

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara singkat Majelis Ulama Indonesia merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap ajaran Islam. Mereka lebih dikenal dengan sebutan ulama, atau orang yang memiliki pemahaman yang lebih pada doktrin-doktrin Islam. Sedangkan menurut situs resmi MUI, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama (www.mui.or.id). Dari definisi itu dapat diambil kesimpulan bahwa MUI merupakan organisasi yang terdiri dari orang yang mempunyai kapasitas dalam setiap urusan agama.

Tujuan Majelis Ulama Indonesia dalam Andi Shofian Efendi (2011: 22), adalah untuk membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu lembaga pemerintah yang menangani urusan agama. Selain MUI, Kantor Urusan Agama (KUA) juga

merupakan satu dari lembaga pemerintah yang menangani agama, lebih spesifiknya mengenai administrasi pernikahan dan perceraian. Selain dari MUI dan KUA yang dinaungi Negara, banyak institusi bukan pemerintah yang menangani seputar agama, salah satunya Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Tidak hanya institusi, Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang bergerak di bidang keagamaan juga telah banyak lahir di Indonesia, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Rasulullah dan lain sebagainya.

Di Indonesia MUI mengeluarkan fatwa-fatwa dan membahas persoalan-persoalan yang terjadi. Dan yang paling mudah dilihat dari tugas MUI yaitu otoritasnya untuk memberikan sertifikasi halal pada kebutuhan pangan. Hal ini bisa dijumpai pada setiap makanan jadi ataupun bahan makanan yang hampir sebagian besar mengenakan logo halal dari MUI. Tanpa terkecuali produk-produk untuk keperluan sehari-hari lainnya seperti peralatan kosmetik dan lain-lain.

Bagaimanapun juga, secara langsung ataupun tidak langsung MUI telah membantu mewujudkan kondusifitas keberagaman masyarakat. Sejauh ini, logo halal pada berbagai macam produk dalam Negeri sedikit-banyaknya telah membuat orang-orang Islam nyaman menjadi konsumen. Meskipun ada juga yang meragukan kehalalan sertifikasi halal itu. Tidak bisa dipandang sebelah mata kontribusi MUI dalam berpartisipasi membentuk masyarakat religius yang umumnya banyak menjadi tujuan dari Kota dan Kabupaten di Indonesia.

Dilihat dari sisi tugasnya, menurut Muhammad Atho Muzdar dalam Andi Shofian Efendi (2011:3-4), MUI memiliki lima fungsi.

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi
2. Sebagai pemberi fatwa
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat
4. Sebagai gerakan *Islah wa al-tajdid*, dan
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam mengurus bidang keagamaan, khususnya agama Islam yang banyak dianut oleh mayoritas orang Indonesia, sudah pasti memberikan dampak pada masyarakat pemeluknya. Apalagi agama selalu menjadi pandangan hidup manusia.

Sebagaimana ajaran yang disampaikan para alim ulama sebelum berdirinya MUI, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia juga mengajarkan tentang faham bahwa hanya ada satu tuhan yang layak disembah, yakni Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat Syahadat yang berbunyi “*asyhadu an la ilaha illa al-allah*”, yang berarti “aku bersaksi bahwasannya tidak ada tuhan selain Allah”.

Durkheim dalam Doyle Paul Johnson (1988:199) menyebutkan, pengalaman agama dan ide tentang yang suci adalah produk kehidupan kolektif; kepercayaan dan ritus agama juga memperkuat ikatan-ikatan sosial di mana kehidupan kolektif itu bersandar. Adanya institusi Majelis Ulama Indonesia memberikan satu kesamaan pada masyarakat Indonesia yang mayoritas rakyatnya beragama Islam. Kesamaan itu adalah tentang keyakinan akan hanya adanya satu tuhan yang layak disembah.

Tidak dapat dihilangkan peran MUI yang telah berkontribusi dalam meningkatkan perilaku keagamaan masyarakat. Melalui produk hukum dan program kerjanya, ajaran Islam menjadi lebih mudah difahami. Dan hal ini menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat baik yang hanya bersifat wawasan agama ataupun kesadaran untuk menyempurnakan ritual agama di kalangan masyarakat menjadi kian bertambah. Dan seperti itulah yang menjadi tujuan dari para ulama.

Antusiasme umat Islam dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan, yang di dalamnya selalu diisi dengan mengadakan acara pawai obor ataupun tabligh akbar, merupakan bukti masih loyalnya perilaku keagamaan umat Islam di Indonesia. Untuk Desa Dirgahayu, acara penyambutan datangnya bulan ramadhan diadakan atas gagasan dari jajaran pengurus MUI Desa Dirgahayu.

Selain dari meningkatkan perilaku keagamaan masyarakat, sebagaimana telah disinggung di atas, dampak dari perilaku keagamaan masyarakat yang loyal terhadap ajaran Islam melahirkan solidaritas di kalangan pemeluknya. Sebagaimana umumnya, satu jenis kesamaan akidah memang membantu menciptakan solidaritas masyarakat. Bukan hanya kesamaan ini, kesamaan latar belakang dan tempat juga dapat mempermudah proses terjadinya solidaritas masyarakat.

Dalam banyak kasus, kesamaan pemahaman, ideologi, aqidah, ritual, latar belakang dan kesamaan-kesamaan lainnya, selalu mendorong terbentuknya solidaritas. Sebagai salah satu contoh, terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan latar belakang dan tujuan yang sama. Karena sebagian

besar Indonesia –yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda- telah diduduki oleh penjajah, maka menimbulkan sebuah tujuan yang sama, yakni kemerdekaan.

Beberapa kondisi di atas tentang perilaku keagamaan masyarakat yang loyal, dapat terlihat di lokasi penelitian. Perilaku keagamaan masyarakat seperti itu juga terbentuk di Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi seperti itu tercipta dikarenakan terdapat peranan MUI tingkat Desa dan juga merupakan visi misi dari Kabupaten Tasikmalaya untuk menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Kabupaten yang religius Islami.

MUI Desa Dirgahayu berusaha meningkatkan kondisi masyarakat yang religius di Desa Dirgahayu. Jalan yang ditempuh MUI Desa adalah dengan cara mengadakan program kegiatan yang berhubungan dengan agama. Sampai saat ini program itu masih terus berlangsung dan mendapat sambutan yang cukup antusias dari warga Desa. Namun selain terciptanya perilaku keagamaan masyarakat yang loyal, penulis juga menemukan perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat. Khususnya kaum muda yang telah mengenal kota urban.

Perubahan gaya hidup kaum muda menyebabkan cara pandang masyarakat juga ikut berubah dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan adanya budaya mentolerir dan budaya permisif dari masyarakat, sehingga suatu penyimpangan pun makin marak terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan budaya eksibisionis (senang menunjukkan dosa/aurat) akan terjadi. Bibit-bibit eksibisionis sudah dapat dilihat di Desa Dirgahayu, golongan muda lebih merasa bangga ketika mereka telah melakukan suatu penyimpangan, bahkan mereka seolah-olah membudayakan penyimpangan itu dengan cara mengajarkannya kepada anak-

anak yang masih duduk di bangku sekolah. Dan keadaan ini menjadi hambatan MUI Desa Dirgahayu dalam menjalankan kapasitasnya sebagai para pewaris nabi.

Mengingat pada permasalahan di atas, Desa Dirgahayu dirasa sangat cocok untuk dijadikan lokasi penelitian tentang peranan MUI yang sampai saat ini telah cukup berhasil dalam membantu mewujudkan visi misi kabupaten Tasikmalaya. Disertai dengan adanya perubahan gaya hidup golongan muda dan cara pandang masyarakat yang saat ini terjadi, maka peran MUI dalam menciptakan masyarakat yang loyal, layak dijadikan bahasan.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang perilaku keagamaan masyarakat yang dipengaruhi oleh MUI. Maka penulis menyusun penelitian dengan judul **“PERANAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENINGKATKAN PERILAKU KEAGAMAAN MASYARAKAT”** Studi di Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikamalaya.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas di sini adalah mengenai perilaku keagamaan masyarakat di Desa Dirgahayu dan peranan MUI Desa Dirgahayu. Perilaku keagamaan yang lahir dari pemahaman, pikiran dan asumsi yang dibentuk oleh doktrin-doktrin MUI. Situasi ini lahir akibat dari adanya Majelis Ulama Indonesia di Desa Dirgahayu.

Peran para ulama yang tergabung dalam MUI Desa Dirgahayu ataupun tokoh masyarakat dan juga tokoh agama jelas sangat berpengaruh. Apalagi kecenderungan masyarakat Desa yang umumnya senantiasa memegang erat

terhadap nilai dan norma. Bahkan dalam banyak penelitian, masyarakat Desa selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran moyangnya. Tidak peduli apakah itu hanya mitos ataupun fakta.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas perilaku keagamaan masyarakat di Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana peranan MUI dalam meningkatkan perilaku keagamaan masyarakat di Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui realitas perilaku keagamaan masyarakat di Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui peranan MUI dalam meningkatkan perilaku keagamaan masyarakat di Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu terdapat ekspektasi dari penulisnya, dan ada dua kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, baik secara akademis maupun secara praktis, kegunaan itu yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wawasan untuk mahasiswa, terlebih lagi untuk mahasiswa sosiologi yang banyak mengkaji tentang masalah masyarakat. Selain itu pula dapat menambah wawasan masyarakat yang berdomisili di Desa Dirgahayu tentang perilaku keagamaan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan penyadaran dalam menempatkan sesuatu. Pemahaman masyarakat dalam menyikapi suatu ajaran agama menjadi sangat penting dalam penelitian yang bertempat di Desa Dirgahayu. Karena pada umumnya ada banyak ketidak-tepatan dalam menyikapi suatu ajaran. Terlebih lagi dalam urusan pemahaman takdir, karena banyak dari masyarakat yang seolah-olah menganut paham fatalis. Semua yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT dan tidak bisa dirubah. Dan pemahaman ini menyebabkan masyarakat cenderung tidak mau mencari solusi. Bukan bermaksud merendahkan atau menyalahkan pemahaman orang lain, tapi untuk menjadi sebagai pemahaman tambahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan lain. Selain itu pula dapat menjadi titik tolak untuk penelitian yang lebih dalam mengenai perilaku keagamaan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian tentang Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Masyarakat ini, MUI merupakan unsur

terpenting yang berperan sebagai subjek. Para ulama memiliki otoritas untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, hal itu merupakan tugas alim ulama sebagai pewaris Nabi. adapun salah satu sifat wajib pada Nabi adalah *Tabligh*, artinya menyampaikan. Begitu juga dengan ulama yang tergabung dalam MUI bertugas sebagai penyampai risalah Allah swt.

Dalam hal ini, MUI Desa menyampaikan doktrin-dontrin Islam kepada masyarakat Desa Dirgahayu di tiap-tiap kampung yang nota bene sebagai objek. Masyarakat Desa Dirgahayu cakupannya cukup luas, terdiri dari lima kampung yang mana jarak dari kampung satu ke kampung yang lainnya jauh..

Adapun tujuan dari penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat yang dilakukan MUI, bertujuan agar adanya peningkatan perilaku keagamaan masyarakat. Bukan hanya itu, peran MUI juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap agama Islam. Sehingga dari pemahaman masyarakat yang bertambah dapat tercipta masyarakat yang religius Islami.

Namun dalam upaya meningkatkan perilaku keagamaan masyarakat, sudah pasti akan menemukan kendala yang dapat menghambat proses meningkatkan perilaku keagamaan masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat itu bisa diklasifikasikan dengan dikotomi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dari MUI itu sendiri, dan faktor eksternal terkait respon dan tingkat antusiasme masyarakat.

Selain dari faktor penghambat, ada juga faktor yang mendorong keberlangsungan proses meningkatnya perilaku keagamaan masyarakat. Seperti

halnya faktor penghambat, faktor pendorong juga dapat diklasifikasikan dengan dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal.

Untuk mengkaji tentang Peranan Majelis Ulama Indonesia dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Masyarakat, digunakan teori yang sangat populer dalam teori sosiologi, yaitu teori struktur fungsional. Teori ini dikembangkan Talcott Parsons (1902-1979), sebagai tokoh sosiologi modern Amerika yang pernah menjabat sebagai Presiden Persatuan Sosiologi Amerika.

Asumsi dasar teori struktur fungsional adalah bermula dari seorang sosiolog berkebangsaan Perancis, Auguste Comte (1798-1857). Dalam Margaret M. Poloma (2013:23), Comte berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi tentang strata sosial (struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi). Akan tetapi ia tidak benar-benar berusaha mengembangkan tesis ini.

Adalah Herbert Spencer (1820-1903) dalam Margaret M. Poloma (2013:25), seorang ahli sosiolog dari Inggris yang selanjutnya membahas sistem sosial dengan mengambil perbandingan dari sistem biologis. Masyarakat merupakan organisme hidup. Akan tetapi sesungguhnya masyarakat tidak benar-benar mirip dengan organisme hidup. Keduanya terdapat perbedaan yang sangat penting. Di dalam sistem organisme, bagian-bagian tersebut saling terkait dalam suatu hubungan yang intim; sedang dalam sistem sosial hubungannya tidak terlalu jelas terlihat seperti dalam sistem biologis.

Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif yang “berbeda” dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang ahli sosiolog Perancis, yaitu Emile Durkheim (1858-1917).

Dalam Margaret M. Poloma (2013:25), Durkheim berpendapat bahwa masyarakat modern sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri.

Secara sederhana teori struktur fungsional adalah menjelaskan bagaimana tiap-tiap struktur dalam sebuah lembaga menjalankan fungsinya. Sehingga lembaga itu dapat bertahan dalam waktu yang panjang. Walaupun sebenarnya struktur dan fungsi tidak selalu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan (George Ritzer – Douglas J. Goodman, 2010:118). Namun dalam nalar yang hanya sepintas juga, tidak mungkin sesuatu diciptakan jika tidak memberikan fungsi. Dengan begitu, struktur fungsional merupakan pemanfaatan dari struktur yang ada dalam sebuah lembaga.

Talcott Parsons, dalam George Ritzer – Douglas J. Goodman (2010:101) menyebutkan bahwa ada empat fungsi penting untuk sistem “tindakan”, dan Parsons meyakini bahwa empat fungsi ini diperlukan dalam semua sistem. Empat fungsi itu kemudian terkenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency*). Skema AGIL bertujuan untuk menciptakan kondisi keberlangsungan suatu sistem dalam struktur. Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Suatu fungsi harus memiliki empat fungsi ini:

1. *Adaptation* (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

3. *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
4. *Latency* (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Dalam hemat Parsons, jika sebuah lembaga telah memiliki skema AGIL ini, hampir dapat dipastikan lembaga itu akan bertahan dalam waktu yang lama. Hal ini dikarenakan mampu memberikan fungsi yang nyata, jelas dan dapat dirasakan manfaatnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kecenderungan manusia adalah mencari keuntungan dari sesuatu.

Bila melihat pada skema AGIL-nya Talcott Parsons, maka MUI Desa Dirgahayu dapat juga memakai konsep dalam sistem AGIL itu. *Adaptation* (Penyesuaian) merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sistem yang ada dalam MUI Desa Dirgahayu bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat Desa. Lebih dari itu, MUI diharapkan bisa menanggulangi kondisi krisis yang terjadi di Desa Dirgahayu. Sejauh ini, peran MUI Desa sejalan dengan visi misi Kabupaten Tasikmalaya yang hendak menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Kabupaten yang religius Islami. Dengan demikian MUI Desa Dirgahayu bisa dikatakan memenuhi konsep adaptasi dalam gagasan Parsons.

Goal attainment (Pencapaian Tujuan) adalah konsep yang membicarakan tujuan. MUI di Desa Dirgahayu harus mampu mencapai tujuan itu dengan misi-misi yang dijalankan dan diterapkan pada masyarakat. Bukan hanya itu, MUI juga harus bisa mendefinisikan tujuan utamanya. Adapun tujuan dari MUI Dirgahayu adalah sama dengan MUI pusat.

Integration (Integrasi atau Penyatuan) sebuah konsep yang berupaya menyatukan berbagai macam komponen-komponen yang ada dalam suatu sistem. Sistem integrasi juga mengelola antarhubungan dalam penyesuaian (A), pencapaian tujuan dan pemeriharaan pola. Diharapkan MUI Desa Dirgahayu mampu menjadi media yang bisa mengintegrasikan masyarakat Desa Dirgahayu dalam satu wadah, mengingat Desa Dirgahayu memiliki fikih yang berbeda dalam masyarakatnya.

Latency (Pemeliharaan pola) adalah usaha yang dilakukan untuk memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi dan pola kultural. MUI Desa Dirgahayu diharuskan untuk bisa menjalan konsep latensi agar keberagaman masyarakat bisa tetap terjaga meskipun dalam situasi pergeseran nilai yang terjadi.

Jika MUI Desa Dirgahayu telah memenuhi skema AGIL ini, hampir dapat dipastikan lembaga MUI akan terasa nyata adanya dan dapat dirasakan manfaatnya. Dan diharapkan dengan adanya skripsi ini, MUI Desa Dirgahayu mampu menjalankan tugasnya sebagai pewaris Nabi, dapat menjadi garda terdepan dalam menegakan ajaran Islam dan menegakan *amar ma'ruf nahi*

mungkar (memeritah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) dan menciptakan masyarakat yang beriman dan bertakwa.

Penjelasan di atas, jika dibuatkan skemanya adalah sebagai berikut:

